

PJ BUPATI APRESIASI PEMILU DI KARANGANYAR

Satgas Lakukan Pengamanan Skala Besar

KARANGANYAR (KR) - Aparat Polres bersama Kodim 0727 Karanganyar menggelar patroli skala besar pascaproses pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2). Patroli yang melibatkan 60 personel gabungan polisi dan prajurit TNI itu menyisir sejumlah kawasan di Bumi Intanpari. Pasukan patroli bertolak dari Mako Polres Karanganyar menuju pos terpadu Alun-alun Karanganyar sampai simpang empat Sroyo Jaten.

Setelah itu, rombongan melanjutkan patroli ke arah Simpang empat Acidatama Kebakkramat, Simpang empat Kebakkramat, Jalan Kebakkramat Tasikmadu, melintasi simpang tiga

Koramil Tasikmadu ke arah PG Tasikmadu dan simpang empat Papahan. Selanjutnya kembali di Mako Polres Karanganyar. Pasukan bersepeda motor dan mobil patroli itu mengamati suasana di area TPS yang dilintasi serta untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pembuat onar.

Kapolres Karanganyar AKBP Jerrold HY Kumontoy mengatakan, patroli bersama ini untuk menjaga kondusivitas kamtibmas di Kabupaten Karanganyar. "Kita melaksanakan pemantauan pasca kegiatan penahapan terakhir yaitu pemungutan dan penghitungan sementara dari pemilu 2024," tandasnya.

Menurut Kapolres, selain menjaga kamtibmas, memberikan rasa aman kepada masyarakat selama proses Pemilu 2023, sekaligus memantau kon-

disi dari semua aspek. Kapolres juga minta masyarakat agar turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Karanganyar.



KR-Abdul Alim

Satgas Pasukan Pengamanan Pemilu di Karanganyar siap melakukan patroli setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

ma proses Pemilu 2023, sekaligus memantau kondisi dari semua aspek. Kapolres juga minta masyarakat agar turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengapresiasi masyarakat yang telah menggunakan hak pilih di TPS. Ia bersama rombongan forkopimda mengecek pelaksanaan di tiga TPS, yakni di Dagen Jaten, Serut Sroyo dan Karanganyar Kota. Berdasarkan pantauandi tiga sampel TPS itu, Timotius meyakini partisipasi pemilihan pada Pemilu 2024 ini mencapai di atas 80 persen.

Timotius mengatakan,

hasil koordinasi dengan KPU Karanganyar, persiapan seluruh logistik dan peralatan tahapan pemungutan maupun penghitungan suara sudah terdistribusi dengan baik. Bahkan, sudah disediakan logistik cadangan bila terjadi hal yang tidak diinginkan. "Secara umum, pelaksanaan proses pemungutan suara di Kabupaten Karanganyar berlangsung aman dan lancar. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak suaranya di Karanganyar cukup tinggi," tandasnya sambil menyebutkan, dalam Pemilu 2024 ini di Kabupaten Karanganyar ada 3.200 TPS, dengan pemilihan sekitar 770 ribu orang. (Lim)-f

DI KABUPATEN PURBALINGGA 1 TPS Akan Gelar PSU

PURBALINGGA (KR) - Dua warga kabupaten Bogor mencoblos di TPS 01 desa Timbang kecamatan Kejobong Purbalingga, Rabu (14/2). Kedua orang yang ditengarai pasangan suami-istri itu tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS setempat. Dijadwalkan, TPS 01 Desa Timbang akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), Minggu (18/2).

"Yang bersangkutan warga Purbalingga dan berdomisili di desa Timbang. Tetapi di KTP, alamatnya di Kabupaten Bogor," kata Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari, Kamis (14/2). Karena sehari-hari tinggal di Desa Timbang, petugas KPPS tidak memeriksa dengan teliti KTP warga tersebut. Identitasnya baru terungkap setelah diumumkan adanya dua pemilih dalam daftar pemilihan khusus (DPK).

"Saat itulah ada saksi yang meminta petugas mengecek KTP. Kemudian baru ketahuan kalau pasangan suami-istri itu ber-KTP Bogor," jelasnya. (Rus)-f

KPU TUNGGU SURAT DARI PPK KARTASURA

1 TPS di Sukoharjo Potensial PSU

SUKOHARJO (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo masih menunggu surat resmi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kartasura terkait rencana Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32 Desa Makmahaji Kecamatan Kartasura. Surat ditunggu sebagai laporan resmi sekaligus untuk memutuskan kemungkinan PSU dan waktu pelaksanaannya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo, Jumat (16/2) mengatakan sudah mendengar kejadian di TPS 32 Desa Makmahaji Kecamatan Kartasura saat proses pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2) lalu.

Informasi tersebut nantinya akan disinkronkan dengan keterangan dari PPK Kartasura. Karena itu, KPU Sukoharjo sampai sekarang masih menunggu surat dari PPK Kartasura. "Ada usulan untuk dilakukan PSU Pemilu 2024 di TPS 32 Desa Makmahaji Kecamatan Kartasura. Kami masih menunggu surat resmi dari PPK," tandas Syakbani.

Menurutnya, KPU Sukoharjo juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sukoharjo. Koordinasi dilakukan mengingat Bawaslu Sukoharjo yang mengusulkan agar dilakukan PSU.

Sebelumnya, komisioner Bawaslu Sukoharjo Eko Budiyanto

mengungkapkan, kemungkinan pemungutan suara di TPS 32 Desa Makmahaji Kecamatan Kartasura harus diulang karena ada temuan dugaan pelanggaran. Dua pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta tidak mendapat undangan resmi dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), namun tetap mengikuti pemungutan suara.

Hal itu diketahui dari hasil pengawasan Bawaslu Sukoharjo saat pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2), di TPS 32 Desa Makmahaji Kecamatan Kartasura.

Dalam pengawasan di TPS 32

Desa Makmahaji Kecamatan Kartasura. Dua pemilih tersebut hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat menggunakan hak pilih. Kedua orang tersebut warga dengan KTP Pekalongan dan Wonosobo. Setelah menemukan kejadian tersebut, Bawaslu Sukoharjo melakukan kajian. Hasilnya, kejadian tersebut berpotensi untuk dilakukan PSU.

"Potensi digelar PSU sangat besar dan PSU akan dilakukan untuk pemungutan suara Pilpres dan DPD. Melihat pengalaman sebelumnya pada pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sukoharjo pernah dilakukan PSU. Seperti pada Pemilu 2019 di wilayah Kecamatan Weru," ungkap Eko Budiyanto. (Mam)-f

HUKUM

TUNTASKAN KASUS MAFIA TANAH KAS DESA Kejati DIY Dapat Apresiasi dari JPW

YOGYA (KR) - Jogja Corruption Watch (JCW) mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dalam menuntaskan kasus dugaan mafia tanah kas desa (TKD) di ketiga kalurahan di Kabupaten Sleman. Ketiga kalurahan tersebut yakni Caturtunggal, Maguwoharjo dan Candibinangun. Teranyar Lurah Candibinangun berinisial SM ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD).

Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba, mengungkapkan kasus dugaan korupsi TKD di Kabupaten Sleman ini menarik perhatian publik karena sudah dua mantan lurah di proses hukum yakni mantan lurah Caturtunggal yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DIY atas vonis 8 tahun penjara pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.

"Sementara persidangan mantan Lurah Maguwoharjo masih berproses di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta," ungkap Baharudin.

JCW meminta pihak Kejati DIY untuk menelusuri ada atau tidaknya aliran uang pada perkara yang menjerat Lurah Candibinangun tersebut, karena kecil kemungkinan aliran dana dalam perkara dugaan penyalahgunaan TKD di Kalurahan Candibinangun hanya dinikmati tersangka SM saja, tapi patut diduga aliran uang mengalir ke pihak lain juga turut serta menikmatinya.

"Ini yang perlu ditelusuri, kasus korupsi itu pelakunya tidak tunggal. Artinya kasus dugaan korupsi yang terjadi selama ini tidak berdiri sendiri. Pihak Kejati DIY sangat perlu untuk menelusuri dugaan keterlibatan perangkat Kalurahan apakah terlibat atau tidak," jelasnya.

Baharudin menambahkan, selain itu perlu juga ditelusuri asal-usul tanah yang dijadikan obyek penyidikan oleh Kejati DIY sehingga Lurah Candibinangun ditetapkan sebagai tersangka. "Tiga kasus dugaan penyalahgunaan TKD di Kabupaten Sleman, membuktikan bahwa lemahnya pengawasan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa," pungkasnya. (Zie)-d

Tabrak Truk, Pak Guru Tewas

KARANGANYAR (KR) - Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai menabrak truk yang sedang berhenti karena mogok di ruas Jalan Lawu di Karangpandan, tepatnya depan Kopi Perjuangan Pandan Kidul, baru-baru ini.

Korban bernama Hangga Brian Maladi (33) seorang guru di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Ia mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol AD 4186 AOF.

Korban mengalami luka serius di bagian

kepala, menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Kasi Humas Polres Karanganyar, AKP Imam, mengatakan kecelakaan lalulintas (lakalantas) tunggal terjadi sekitar pukul 19.35. Saat kejadian, truk Nopol AD 8744 OF dikendarai Tukiran (40) warga Randusari Slogohimo Wonogiri, mengalami kerusakan pada penggerak roda atau gardan. Truk ini berhenti di jalan menghadap arah ke timur/Tawangmangu. Kemudian dari arah

yang sama melaju sepeda motor yang dikendarai korban. Diduga korban tidak mengetahui ada truk berhenti. Naasnya motor korban menabrak bagian belakang truk dan terjadilah lakalantas.

Saat dievakuasi, kondisi Brian Maladi mengalami luka parah, sedangkan sepeda motor mengalami ringsek bagian depan. "Korban sam-pai terpalant dan mengalami luka parah dibagian kepala. Pengendara sepeda motor ini meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit," jelasnya. (Lim)-d

Usai Amankan Pemilu, Petugas Linmas Meninggal

SLEMAN (KR) - Sehari setelah mendapat tugas mengamankan pemungutan suara Pemilu 2024, seorang petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sleman, meninggal dunia.

Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY, Zaenuri Ikhsan, Jumat (16/2), menuturkan petugas linmas atasnama Sukidi yang bertugas di TPS 1 Bulus Kidul Candibinangun, Pakem Sleman, meninggal pada Kamis (15/2). "Saya mendapat informasinya tadi malam," jelasnya.

Menurut Zaenuri, KPU DIY akan mengirimkan tim untuk menggali informasi lebih jauh mengenai penyebab meninggalnya salah satu petu-

gas pengamanan TPS tersebut. "Nanti akan ada tim khusus untuk menggali informasi lebih jauh," ujar dia.

Zaenuri memastikan hak petugas yang meninggal dunia bakal terpenuhi. KPU DIY segera mengupayakan pemberian santunan bagi keluarga petugas linmas yang meninggal dunia setelah berkoordinasi sesuai persetujuan KPU RI.

"Nanti kami perjuangkan untuk mendapatkan santunan karena sudah ada besaran yang

diberikan kepada keluarga yang meninggal. Nanti perlu pendataan karena untuk menyiapkan anggaran harus seizin KPU RI," tuturnya.

Dari keseluruhan anggota badan adhoc KPU yang bertugas di 11.932 TPS yang tersebar di 438 desa pada 78 kecamatan, Zaenuri menyebut kasus petugas meninggal dunia baru kali pertama di DIY untuk Pemilu 2024. "Baru ini di DIY yang kami dapat informasinya," ujarnya.

Menurut Zaenuri, jumlah petugas pengamanan pemilu disebarkan sama rata di seluruh TPS dengan menempatkan masing-masing dua orang petugas linmas. "Cuma yang membedakan adalah banyak sedikitnya pemilih.

"Kan ada yang jumlah pemilihnya maksimal dan ada yang tidak begitu banyak," jelasnya.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY, Sri Surani, menambahkan seluruh petugas Satlinmas dalam menjalankan tugasnya dilindungi jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan. (Zie)-f

DUGAAN PELANGGARAN PEMILU KEMENTAN

Bawaslu Bantul Belum Bisa Melanjutkan

BANTUL (KR) - Bawaslu Bantul menyampaikan hasil kajian dugaan pelanggaran pemilu pada kegiatan Kementerian Pertanian (Kementan) yang dilaksanakan di Stadion Sultan Agung pada tanggal 24 Januari lalu.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho, Jumat (16/2), menuturkan pihaknya telah melakukan serangkaian upaya pemanggilan terhadap terlapor, para saksi dan ahli untuk menguatkan proses dugaan pelanggaran ini. Pemanggilan telah dilakukan kepada para saksi sebanyak 8 orang serta pihak terlapor.

"Tapi sampai dengan dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, ada beberapa saksi serta terlapor yang tidak hadir da-

lam pengumpulan keterangan ini," jelasnya.

Diakui, dalam pemanggilan ini merujuk pada UU No 7 Tahun 2017 dan ada keterbatasan yang dihadapi oleh Bawaslu Bantul bahwa setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali tidak bisa dilakukan pemanggilan secara paksa.

Didik menambahkan dari 8 saksi yang dipanggil oleh Bawaslu Bantul yang hadir sebanyak 4 orang antara lain dari Dinas pertanian Bantul, Dinas Pertanian DIY, Protokol Pemkab Bantul termasuk Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, yang pada saat itu diundang sebagai bupati.

Sedangkan 4 saksi yang lain tidak hadir termasuk di antaranya Caleg DPR RI meskipun sudah dilakukan pe-

manggilan sebanyak 2 kali. "Sesuai dengan Perbawaslu No 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu dalam hal ada unsur-unsur yang belum memenuhi bukti kuat dalam pelanggaran pemilu didasarkan keterangan para saksi maka proses penanganan dugaan pelanggaran dihentikan," paparnya.

Sementara Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bantul, M Rifqi Nugroho, menambahkan dugaan pelanggaran Kementan RI di Stadion Sultan Agung adalah temuan dari Bawaslu Bantul. Dari hasil pembahasan memang ada potensi pada pelanggaran tindak pidana pemilu terkait dengan kegiatan yang menguntungkan atau

merugikan peserta pemilu.

Hal ini karena pada saat itu ada caleg DPR RI yang hadir dan memberikan statmen dalam kegiatan tersebut. Tapi dalam proses klarifikasi yang telah berjalan cukup panjang ada kendala, karena ketidakhadiran saksi-saksi kunci yang berasal dari penyelenggara kegiatan dalam hal ini Kementerian Pertanian RI.

Mengingat terbatasnya kewenangan Bawaslu Bantul dalam upaya pemanggilan ini, serta terbatasnya keterangan saksi yang hadir maka Bawaslu Bantul menyimpulkan kasus dugaan pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertanian belum bisa dilanjutkan kepada proses berikutnya. (Jdm)-d